

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara agraris di dunia dimana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dibidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Berdasarkan data BPS (2017) sektor pertanian memiliki kontribusi bagi Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 sebesar 13,14 persen lebih besar dibandingkan sektor lainnya kecuali sektor industri pengolahan (Lampiran 2).

Dalam` pengembangan sektor pertanian, masih banyak muncul masalah- masalah diantaranya keterbatasan modal dan lemahnya organisasi petani. Keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian. Masalah ini ditandai dengan sulitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh modal serta jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan. Sedangkan petani tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga perbankan (Putri, 2012).

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal dan lembaga perbankan yang sulit diakses oleh petani kecil, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Berdasarkan keadaan ini pemerintah meluncurkan program yang ditujukan untuk membantu permodalan petani, salah satunya dengan membuat program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP mencoba mengatasi masalah dana dengan cara menyalurkan dana kepada petani melalui kelompok tani atau gapoktan (BPTP Sumatera Barat, 2010). Dana PUAP pada prinsipnya hanya sebagai stimulus dalam menggerakkan usaha tani petani yang kemudian dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. (Permentan,

2015).

Gapoktan telah diberdayakan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 dan sampai tahun 2016. PUAP memberikan bantuan penguatan modal sebesar 100.000.000 rupiah per Gapoktan dan selanjutnya Gapoktan harus menumbuhkan LKM-A untuk mengelola modal tersebut untuk digulirkan diantara petani dan akhirnya diharapkan modal tersebut berkembang (BPTP Sumatera Barat, 2014).

Menurut Pasarib *et al.* (2011) sebagian diantara penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP ini berhasil mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) sebagaimana diharapkan oleh program ini, namun sebagian besar lainnya tidak berhasil mengembangkannya. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Kuntoro (2011) modal sosial memiliki pengaruh terhadap tahapan perolehan kredit, dimana tahapan perolehan kredit dibagi menjadi tiga yakni *rescue*, *recovery*, dan *development*. Masing-masing tahapan tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Pada tahap *rescue* dana yang dapat diperoleh oleh nasabah berkisar Rp 100 ribu rupiah sampai Rp 200 ribu rupiah, lalu pada tahap *recovery* dana yang dapat diperoleh oleh nasabah berkisar 200 ribu rupiah keatas sampai 500 ribu rupiah, dan pada tahap *development* dana yang dapat diperoleh oleh nasabah sebesar 500 ribu rupiah keatas. Dari hasil penelitian tersebut sebanyak 43 persen masyarakat memperoleh kredit pada tahap *development*, pada tahap *recovery* sebesar 34 persen dan sebesar 23 persen memperoleh kredit pada tahap *rescue*.

Dari penelitian tersebut juga didapat bahwa jaringan sosial seperti hubungan pertetangaan, pertemanan dan juga interaksi yang terbentuk dari pihak-pihak yang bersangkutan merupakan salah satu modal sosial yang memiliki pengaruh paling besar dalam tahapan perolehan kredit bagi masyarakat, dimana mereka memperoleh kredit atas dasar jaringan sosial sebesar 47 persen, sedangkan kepercayaan 30 persen sedangkan norma sebesar 20 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sosial terikat

(*bonding*) memiliki pengaruh terhadap perolehan kredit mikro karena hubungan-hubungan seperti kerabat, tetangga, teman merupakan bentuk dari modal sosial yang terikat (*bonding*).

B. Rumusan Masalah

LKM-A Pincuran Bonjo merupakan salah satu LKM-A yang ada Sumatera Barat, yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Timur. LKM-A Pincuran Bonjo berdiri pada tanggal 15 Februari 2008 dan memiliki Badan Hukum No 29/BH/KUMK-PYK/VI/2008 pada tanggal 3 Juni 2008. Pada awal terbentuknya LKM-A Pincuran Bonjo memiliki anggota sebanyak 35 orang, hingga tahun 2019 anggota LKM-A Pincuran Bonjo meningkat menjadi 211 orang. Lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) Pincuran Bonjo merupakan salah satu LKM-A yang terus berkembang di Sumatera Barat. Melihat perkembangan LKM-A Pincuran Bonjo dari anggotanya yang selalu bertambah dan juga mampu bertahan dari tahun 2008 sampai saat ini.

LKM-A Pincuran Bonjo telah banyak memperoleh prestasi yang baik dengan menerima penghargaan sebagai Koperasi kelas A (sangat baik) pada tahun 2012 di Kota Payakumbuh, Koperasi Award harapan II tahun 2013 dari Gubernur Sumatera Barat, satu-satunya LKM-A yang memiliki Sub Terminal Agribisnis (STA) di Sumatera Barat, dan juga ada Pusat Pelatihan Pertanian dan Sumberdaya. LKM-A Pincuran Bonjo juga dijadikan sebagai tempat pelatihan, kunjungan dan juga sebagai tempat magang. Dan pengurus LKM-A Pincuran Bonjo juga telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan dan juga berkontribusi bagi pendirian LKM-A di daerah lain.

Namun dengan prestasi yang telah didapatkan tersebut, pihak LKM-A masih memiliki masalah dalam pengembalian kredit. Dimana masih terjadi kemacetan dalam pengembalian dana kredit yang telah dipinjamkan. Padahal di saat awal nasabah akan melakukan peminjaman, nasabah dan pengurus membuat surat perjanjian, dan akan diberikan sanksi sosial seperti akan didatangi rumahnya secara bersama-sama oleh

pengurus LKM-A dan juga akan diumumkan di mesjid jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu dan jika telah dilakukan berkali-kali. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang kebanyakan petani ini, resiko kegagalan usahatani juga sangat besar. Jika usaha tani yang dijalankan petani gagal, maka LKM-A juga akan mengalami kerugian karna sistem pinjaman yang diberikan adalah bagi hasil. Dan nantinya di akhir saat pembagian SHU bagian untuk petani lain juga akan berkurang. Untuk usaha yang dijalankan peminjam masih belum banyak yang berorientasi bisnis, sehingga usaha yang mereka jalankan sulit untuk berkembang. Ini terkadang berakibat pada penunggakan pengembalian pinjaman. Sehingga peneliti ingin melihat apakah modal sosial memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan pinjaman di LKMA Pincuran Bonjo. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat apakah modal sosial juga memiliki pengaruh dalam pengembalian kredit di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo, sehingga Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo dapat bertahan sampai saat ini. Untuk itu, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah : Apakah modal sosial memiliki pengaruh terhadap pengembalian kredit di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo?

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Peran Modal Sosial dalam Pengembalian Kredit di LKM-A Pincuran Bonjo, Kelurahan Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timr, Kota Payakumbuh.**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melihat peran modal sosial dalam pengembalian kredit di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pincuran Bonjo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan

masukannya bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi LKM-A Pincuran Bonjo dan LKM-A lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait peranan modal sosial dalam pengembalian kredit pada LKM-A Pincuran Bonjo dan modal sosial yang paling mempengaruhi pengembalian kredit.
2. Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebagai sarana dalam menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis terima dan juga agar dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

